



## **DIPLOMASI PERLINDUNGAN PMI: UPAYA INDONESIA MENANGANI KASUS PENEMBAKAN PMI DI MALAYSIA**

Lisbet\*

Abstrak

*Pada 24 Januari 2025 terjadi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang mengakibatkan 3 orang terluka dan 2 orang meninggal dunia. Tulisan ini hendak menganalisis bagaimana diplomasi perlindungan PMI sebagai upaya Indonesia dalam menangani kasus penembakan PMI di Malaysia. Upaya diplomasi telah dilakukan mulai dari Presiden, Kementerian Luar Negeri serta pemangku kepentingan lainnya. Komisi I DPR RI mendukung komitmen Kemlu untuk memastikan agar investigasi dilakukan secara terbuka namun tetap menjaga hubungan baik dengan Malaysia agar kerja sama bilateral tetap terjaga. Komisi I DPR RI dan Komisi terkait juga perlu mendorong Kemlu serta semua pemangku kepentingan terkait agar segera melakukan koordinasi sehingga penanganan kasus tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta melakukan mitigasi agar kasus serupa jangan sampai terjadi kembali. Komisi I DPR RI dan Komisi terkait melalui fungsi pengawasan juga mendorong Kemlu serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan agar penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM terhadap seluruh PMI.*

### **Pendahuluan**

Pada 24 Januari 2025 terjadi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan tiga orang terluka dan dua orang meninggal dunia. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail menyampaikan bahwa kasus tersebut berawal dari adanya laporan Pusat Kontrol Area Klang bahwa terdapat kapal mencurigakan di perairan Malaysia (“DPR Mendesak”, 2025). Menurut Saifudin penembakan terjadi menyusul seruan berhenti dan tembakan peringatan ke udara tidak digubris oleh pengemudi kapal, bahkan menabrak kapal patroli maritim hingga beberapa kali (“RI Minta Malaysia”, 2025). Selanjutnya aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) mengarahkan tembakan ke mesin kapal yang malah mengakibatkan korban jiwa (“Dua WNI Tewas”, 2025). Direktur Jenderal APMM, Laksamana Datuk Mohd Rosli Abdullah menyatakan bahwa penembakan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai bentuk pertahanan diri karena adanya upaya penyerangan terhadap APMM dengan senjata tajam. Sebaliknya, para korban penembakan membantah tuduhan tersebut (“WNI: Tidak Ada Perlawanan”, 2025).

\*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: Lisbet\_310183@yahoo.com.

Aksi penembakan terhadap pekerja Indonesia memicu berbagai kecaman karena APMM dianggap telah menggunakan kekuatan berlebihan dalam insiden tersebut. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyesalkan adanya korban jiwa. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada WNI yang mengalami kesulitan di luar negeri, serta memastikan proses hukum yang adil dalam setiap insiden yang melibatkan WNI, termasuk terhadap kelima korban insiden di Malaysia. Tulisan ini hendak menganalisis bagaimana diplomasi perlindungan PMI sebagai upaya Indonesia dalam menangani kasus penembakan PMI di Malaysia.

## **Diplomasi Perlindungan PMI**

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyampaikan bahwa kasus penembakan lima PMI di Malaysia tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran hak asasi manusia (“Aparat Malaysia Penembak”, 2025). Kasus penembakan PMI di perairan Pulau Rhu Malaysia ini menambah jumlah kasus PMI yang ditembak otoritas bersenjata Malaysia tanpa proses peradilan dan penyelesaian yang serius (“WNI: Tidak ada”, 2025). Berdasarkan catatan Migrant Care, terdapat sebanyak 75 kasus serupa selama kurun waktu tahun 2005-2025 (“Aparat Malaysia”, 2025). Dari 75 kasus tersebut, sebanyak 79 orang PMI ditembak oleh otoritas Malaysia (“Presiden Hormati”, 2025).

Untuk menangani kasus penembakan PMI di perairan Tanjung Rhu ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Malaysia pada tanggal 27 Januari 2025, Presiden RI, Prabowo Subianto, telah membahas kasus tersebut dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo yakin bahwa Pemerintah Malaysia akan melakukan investigasi yang terbaik (“Presiden Hormati Proses”, 2025).

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, juga mendorong Pemerintah Malaysia untuk melakukan investigasi termasuk adanya potensi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Judha Nugraha memastikan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur memberikan pendampingan hukum kepada para korban penembakan, membiayai perawatan mereka di rumah sakit serta mengurus kepulangan jenazah korban yang meninggal dunia (“Korban Penembakan Bantah”, 2025).

Pada tanggal 28 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur melakukan akses ke konsuleran terhadap korban yang dirawat di Rumah Sakit Klang dan Rumah Sakit Serdang. Berdasarkan keterangan dari para korban, kapal yang mereka tumpangi mengangkut sebanyak 23 PMI yang merupakan pekerja migran ilegal (“Aparat Malaysia Penembak”, 2025). Selain itu, KBRI Kuala Lumpur juga meminta pengacara KBRI untuk terus mengumpulkan informasi secara lengkap agar mendapatkan kronologis kejadian secara jelas sehingga dapat menyiapkan langkah hukum yang diperlukan.

Selain Kemlu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiroy menyatakan bahwa Komnas HAM akan menjajaki peluang kerja sama dengan Komnas HAM Malaysia, Suhakam (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia) untuk membantu menangani kasus penembakan WNI di Malaysia. Peluang ini dimungkinkan karena selama ini kedua lembaga telah memiliki kerja sama yang dilakukan dengan cara berbagi informasi dan praktik baik tentang kasus-kasus HAM yang menjadi perhatian maupun yang ditangani oleh kedua lembaga (“Komnas HAM Malaysia”, 2025).

### **Penyempurnaan Sistem Perlindungan PMI**

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi PMI karena jaraknya yang berbatasan langsung dengan Indonesia. PMI biasanya keluar masuk ke Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan, Dumai dan Batam. Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono, menyampaikan bahwa menjelang Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha merupakan waktu arus pulangnya PMI ilegal. Banyak PMI ilegal yang kembali ke Malaysia bahkan membawa pekerja baru setelah hari raya (“Aparat Malaysia”, 2025). Untuk mencegah insiden penembakan terhadap PMI terulang kembali, Presiden Prabowo menghimbau calon PMI agar tidak tertipu oleh sindikat-sindikatan pekerja imigran ilegal yang menjanjikan bisa masuk ke negara lain karena dapat berakibat tindakan tertentu dari negara asing yang dituju (“Komnas HAM Malaysia”, 2025).

Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem Perlindungan PMI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (“DPR Rekomendasikan”, 2025). Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya sejak tahun 2012. Namun, desakan untuk memperbaiki sistem tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh (“DPR Rekomendasikan”, 2025).

Ada enam langkah rekomendasi DPR untuk memperbaiki sistem Perlindungan PMI (“DPR Rekomendasikan”, 2025), antara lain: *pertama*, meningkatkan kerja sama bilateral. Pemerintah Indonesia perlu terus berupaya memperkuat kerja sama bilateral dengan negara tempat PMI bekerja. Upaya penguatan ini penting karena kedua negara perlu menyepakati langkah konkret agar mengurangi risiko yang dihadapi PMI serta memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang lebih baik. *Kedua*, pemerintah perlu merevisi kebijakan terkait dengan pengiriman PMI ke luar negeri. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan yang komprehensif dan persiapan PMI yang dikirim ke luar negeri sehingga mereka mengetahui hak-haknya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap agen tenaga kerja untuk meminimalkan upaya penipuan dan eksploitasi terhadap PMI. *Ketiga*, perlindungan hukum yang lebih kuat. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan peran dan kapasitas perwakilan konsuler Indonesia di negara PMI bekerja. Perwakilan tersebut harus lebih aktif dalam melindungi PMI yang berada di situasi berbahaya. Di samping itu, PMI perlu diberikan pemahaman mengenai jalur komunikasi dengan perwakilan konsuler setempat jika

mereka menghadapi masalah, serta mendapatkan pengetahuan tentang undang-undang di negara tempat mereka bekerja.

Langkah *keempat* yang direkomendasikan DPR adalah pemerintah perlu melakukan pelatihan dan penyuluhan keamanan kepada PMI. PMI perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang haknya. PMI juga perlu diberikan pelatihan keselamatan dan perlindungan diri dalam situasi berbahaya. *Kelima*, perlunya peningkatan dalam pengawasan dan pemantauan. PMI sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak terpantau secara baik. Perlu ada sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap keberadaan serta kondisi pekerja dan terhadap agensi. Agensi yang menempatkan PMI sering kali tidak cukup memperhatikan kesejahteraan pekerja. *Keenam*, jaminan sosial untuk PMI. Perlunya penyediaan dana atau asuransi perlindungan sosial bagi PMI yang dapat digunakan pada saat PMI terjadi musibah.

Terkait kasus penembakan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh juga mengecam keras kasus penembakan tersebut dan meminta agar Kemlu membuat tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Soleh juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan tegas dan cepat dalam membentuk tim investigasi (DPR RI, 2025a). Menurut Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Habib Idrus Aljufri, Kemlu dapat melakukan komunikasi diplomatik proaktif dengan mengajak Pemerintah Malaysia untuk menjelaskan kronologi peristiwa dan memastikan penyelidikan yang transparan terhadap kasus tersebut. Selain itu, Kemlu perlu menyampaikan nota diplomatik yang menekankan pentingnya perlindungan PMI di Malaysia (DPR RI, 2025b).

## **Penutup**

Kasus penembakan PMI di perairan Tanjung Rhu, Malaysia perlu dijadikan momentum bagi pemerintah Indonesia agar kasus serupa tidak terulang kembali. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, maka Pemerintah Indonesia perlu memperbaiki sistem perlindungan PMI, salah satunya dengan cara memperkuat kerja sama bilateral. Penguatan kerja sama bilateral ini penting karena di dalamnya terdapat perjanjian atau nota kesepahaman mengenai hak dan perlindungan PMI. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mendukung komitmen Kemlu untuk memastikan agar investigasi dilakukan secara terbuka namun tetap menjaga hubungan baik dengan Malaysia agar kerja sama bilateral tetap terjaga.

Selain itu, Komisi I DPR RI bersama dengan Komisi terkait, seperti Komisi IX dan Komisi XIII DPR RI juga perlu mendorong Kemlu serta semua pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran dan Komnas HAM agar segera melakukan koordinasi sehingga penanganan kasus tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta melakukan mitigasi agar kasus serupa jangan sampai terjadi kembali.

Komisi I DPR RI bersama dengan Komisi terkait, seperti Komisi IX dan Komisi XIII DPR RI, melalui fungsi pengawasan juga mendorong Kemlu serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan agar penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM terhadap seluruh PMI di luar negeri dapat terjaga.

## Referensi

- Aparat Malaysia penembak WNI dinonaktifkan. (2025, Januari 31). *Kompas*, 4.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI]. (2025a, Januari 28). *Insiden penembakan PMI, Oleh Soleh: Pemerintah harus bentuk tim investigasi*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/53775/t/Insiden%20Penembakan%20PMI,%20Oleh%20Soleh:%20Pemerintah%20Harus%20Bentuk%20Tim%20Investigasi>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI]. (2025b, Januari 28). *Habib Idrus: Penembakan PMI oleh otoritas Malaysia perlu langkah diplomatik bijak Indonesia*<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/53771/t/Habib%20Idrus:%20Penembakan%20PMI%20oleh%20Otoritas%20Malaysia%20Perlu%20Langkah%20Diplomatik%20Bijak%20Indonesia>
- DPR mendesak Malaysia transparan soal penembakan. (2025, Februari 5). *Kompas*, 4.
- DPR rekomendasikan 6 langkah perbaikan perlindungan pekerja migran Indonesia. (2025, Februari 10). *Media Indonesia*, 3.
- Dua WNI tewas, desak usut tuntas aksi Otoritas Malaysia. (2025, Februari 5). *Media Indonesia*, 2.
- Komnas HAM Malaysia didorong ungkap penembakan 5 WNI. (2025, Februari 1). *Kompas*, 3.
- Korban penembakan bantah melawan APMM. (2025, Januari 30). *Media Indonesia*, 2.
- Presiden hormati proses di Malaysia. (2025, Januari 31). *Media Indonesia*, 2.
- RI minta Malaysia selidiki penembakan 5 pekerja Indonesia. (2025, Januari 28). *Kompas*, 1 dan 15.
- WNI: Tidak ada perlawanan ke aparat. (2025, Januari 30). *Kompas*, 1 dan 15.